



RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT

2025



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

Rencana Kerja tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Rencana Kerja tahun 2025 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2025, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Rencana Kerja ini.

Bandung, 9 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN.....	8
TAHUN 2023.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	17
2.4. <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	31
BAB III.....	36
TUJUAN DAN SASARAN.....	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.....	37
3.3. Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV.....	48
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	48
PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	10
Tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat	16
Tabel T-II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan.....	22
Tabel T-II.4 Kamus Bantuan Keuangan Reguler Tahun 2025	34
Tabel T-II.5 Rekap usulan Bantuan Keuangan Reguler Kabupaten/Kota Melalui Forum Perangkat Daerah	35
Tabel T-III. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	41
Tabel T-IV. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat

Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Barat tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2025 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJPD, RPD dan RKPD Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ;
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; dan
29. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- 1.2. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- 1.3. Landasan Hukum
Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.
- 2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
Menjelaskan *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025.
Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- 3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menguraikan rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN
TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menilai pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2023 yang dibandingkan dengan Renstra Disdukcapil Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sampai dengan Tahun 2023, alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Belanja
 - Belanja Operasi sebesar **Rp. 14.642.948.991,-**
 - Belanja Modal sebesar **Rp. 308.660.679,-**
2. Realisasi Keuangan dan Fisik
 - Realisasi Keuangan Belanja Operasi sebesar **Rp. 13.450.792.420,- (91,85%)**
 - Realisasi Keuangan Belanja Modal sebesar **Rp. 288.839.660,- (93,59%)**
 - Realisasi Fisik sebesar **100%.**

Renja Disdukcapil Tahun 2023 merencanakan 5 program dan 12 kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 12 kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Disdukcapil sampai dengan Tahun 2023, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1																					
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	50.847.750.000	A	25.635.114.727	A	13.367.553.751	100,00	12.138.263.466	100,00	90,80	85,00	37.773.378.193	85,00	74,29		
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi	100	Persen		100		100		100									
				Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100	Persen		100		100		100									
2	12	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Dokumen	1.853.750.000	20	554.980.499	10	150.000.000	10	148.064.312	100,00	98,71	30	703.044.811	100,00	37,93		
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	21	Dokumen	450.000.000	14	165.078.970	7	75.000.000	7	73.568.639	100,00	98,09	21	238.647.609	100,00	53,03
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	192.750.000	3	168.378.964	-	-	-	-	3	168.378.964	100,00	87,36		
2	12	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	776.000.000	3	195.177.815	-	-	-	-	3	195.177.815	100,00	25,15		
2	12	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9	Dokumen	435.000.000	6	26.344.750	3	75.000.000	3	74.495.673	100,00	99,33	9	100.840.423	100,00	23,18
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,71					100,00	47,18		
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	9	Dokumen	34.488.000.000	6	17.764.909.135	3	9.689.069.298	3	8.592.812.998	100,00	88,69	9	26.357.722.133	100,00	76,43
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan	42	Bulan	34.053.000.000	28	17.694.004.772	14	9.629.069.298	14	8.561.074.465	100,00	88,91	42	26.255.079.237	100,00	77,10
2	12	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	9	Lap	435.000.000	6	70.904.363	3	60.000.000	3	31.738.533	100,00	52,90	9	102.642.896	100,00	23,60
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)															100,00	70,90				100,00	50,35
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Tinggi	Rendah
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	135	Orang	2.035.000.000	45	751.650.545	45	46.100.000	45	24.019.000	100,00	-	90	775.669.545	66,67	38,12
2	12	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135	Orang	224.000.000	90	-	45	46.100.000	45	24.019.000	100,00	-	135	24.019.000	100,00	10,72
2	12	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan se Jawa Barat	9	Kali	1.476.000.000	9	589.400.645	-	-	-	-	-	-	9	589.400.645	100,00	39,93
2	12	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota	12	Kali	335.000.000	12	162.249.900	-	-	-	-	-	-	12	162.249.900	100,00	48,43
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)															33,33	-				100,00	44,18
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	36	Bulan	5.456.000.000	24	2.966.366.339	12	1.805.596.473	12	1.859.182.891	100,00	102,97	36	4.825.549.230	100,00	88,44
2	12	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Bulan	1.657.000.000	24	827.939.459	12	635.186.617	12	614.939.051	100,00	96,81	36	1.442.878.510	100,00	87,08
2	12	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik penanganan covid 19 DAK Non Fisik	12	Jenis	183.000.000	12	84.887.000	-	-	-	-	-	-	12	84.887.000	100,00	46,39
2	12	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	36	Bulan	3.616.000.000	24	2.053.539.880	12	1.170.409.856	12	1.244.243.840	100,00	106,31	36	3.297.783.720	100,00	91,20
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)															66,67	67,71				100,00	74,89
Predikat kinerja															Sedang	Sedang				Sangat Tinggi	Sedang

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	2	12	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat	36	Bulan	4.875.000.000	24	2.388.859.193	12	1.311.833.500	12	1.278.518.657	100,00	97,46	36	3.667.377.850	100,00	75,23	
	2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Bulan	950.000.000	24	280.814.961	12	98.820.000	12	92.459.096	100,00	93,56	36	373.274.057	100,00	39,29
	2	12	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	3.925.000.000	24	2.108.044.232	12	1.213.013.500	12	1.186.059.561	100,00	97,78	36	3.294.103.793	100,00	83,93
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)														100,00	95,67			100,00	61,61			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah			
	2	12	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Bulan	2.140.000.000	24	1.208.349.016	12	364.954.480	12	235.665.608	100,00	64,57	36	1.444.014.624	100,00	67,48	
	2	12	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	36	Bulan	700.000.000	24	514.321.013	12	183.133.000	12	174.165.300	100,00	95,10	36	688.486.313	100,00	98,36
	2	12	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	36	Bulan	770.000.000	24	325.234.946	12	117.061.480	-	-	-	-	24	325.234.946	66,67	42,24
	2	12	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	36	Bulan	670.000.000	24	368.793.057	12	64.760.000	12	61.500.308	100,00	94,97	36	430.293.365	100,00	64,22
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)														66,67	63,36			88,89	68,27			
Predikat kinerja														Sedang	Rendah			Tinggi	Sedang			
Rata-rata Capaian kinerja Program (%)														100,00	75,40			94,44	63,94			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah			
	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	83,25	Persen	1.336.000.000	83,92	501.615.325	83,25	420.000.000	91,14	394.902.276	109,48	94,02	175	896.517.601	91,14	67,10	
	2	12	02	1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	81	Kab/Kota	668.000.000	54	338.091.004	27	285.000.000	27	263.393.526	100,00	92,42	81	601.484.530	100,00	90,04	
	2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah pengelolaan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	81	Kab/Kota	668.000.000	54	338.091.004	27	285.000.000	27	263.393.526	100,00	92,42	81	601.484.530	100,00	90,04
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)														100,00	92,42			100,00	90,04			
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,31			100,00	41,98				
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
2	12	04	1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	81	Kab/Kota	1.250.000.000	54	584.178.706	27	455.000.000	27	436.931.800	100,00	96,03	81	1.021.110.506	100,00	81,69	
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	81	Dok	675.000.000	54	412.659.900	27	300.000.000	27	293.794.020	100,00	97,93	81	706.453.920	100,00	104,66
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta pembinaan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	324	orang	575.000.000	216	171.518.806	108	155.000.000	108	143.137.780	100,00	92,35	324	314.656.586	100,00	54,72
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,14			100,00	79,69				
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	98,29			100,00	61,49				
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah				
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	100	Persen	321.000.000	100	126.417.708	100	75.000.000	100,00	71.730.400	100,00	95,64	200	198.148.108	100,00	61,73	
2	12	05	1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	9	Dok	321.000.000	6	126.417.708	3	75.000.000	3	71.730.400	100,00	95,64	9	198.148.108	100,00	61,73	
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat	9	Dok	321.000.000	6	126.417.708	3	75.000.000	3	71.730.400	100,00	95,64	9	198.148.108	100,00	61,73
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,64			100,00	61,73				
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	95,64			100,00	61,73				
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												108,23	95,25			94,16	66,21				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang				

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : **Diterapkannya sistem pelaksanaan kegiatan secara team of team**
 Faktor penghambat pencapaian kinerja : **Perubahan beberapa komponen yang dapat di realisasikan setelah penetapan perubahan**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota
3. Persentase Data yang Dimanfaatkan
4. Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2023 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel T-II.2.

Tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	80,00%	99,00%	84,30%	88,55%	89,05%	89,55%	84,35%	NA	NA	NA	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat dengan adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, dampak diantaranya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi, yang tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang Keadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan akurat, Perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan Ancaman *Threaths* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 2) Kualifikasi Pendidikan ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang cukup tinggi, di tingkatan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) mencapai 23 Orang dari total ASN yang berjumlah 38 Orang;
- 3) Sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah PD Provinsi Jawa Barat terutama Server data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi yang semakin baik
- 4) Keleluasaan menentukan besaran anggaran untuk kegiatan perencanaan yang diberikan oleh kepala daerah;

KELEMAHAN (W) :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia perencanaan dan pelaksana teknis yang tidak merata;
- 2) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang sangat terbatas yaitu hanya penyusunan profil kependudukan;
- 3) Sumber data hasil capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang kurang lengkap sehingga berpengaruh dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 4) Masih lemahnya koordinasi di internal PD juga lintas Perangkat Daerah, juga dengan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll ;
- 5) Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya;
- 6) Belum konsistennya antara Perencanaan dan realisasi kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) UU nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Jumlah Penduduk Jawa Barat yang terbesar di Indonesia;
- 3) Keinginan masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang tinggi;

- 4) Apresiasi dari pimpinan daerah, DPRD, dan perangkat daerah lainnya yang cukup baik tentang keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, terutama akan ketersediaan data kependudukan yang *up to date*;
- 5) Kepercayaan pimpinan daerah, DPRD dan PD serta Lembaga dan Organisasi di lingkup Provinsi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ANCAMAN (T):

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Luas wilayah yang besar, dan masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa akta catatan sipil dan dokumen administrasi kependudukan tidak begitu penting;
- 3) Penduduk yang masuk dan selanjutnya berdomisili di wilayah Jawa Barat tanpa dilengkapi dokumen kependudukan yang sah.

Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman;
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan Dukcapil Prima;
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota melatih dan menyediakan petugas Administrator

- Database Kependudukan (ADB) untuk dijadikan sebagai super user SIAK terpusat;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota menyiapkan para operator SIAK yang akan dilatih Tim Teknis;
 - c. Penerbitan Identitas Kependudukan merupakan hulu dari pelayanan administrasi kependudukan melalui NIK bagi Penduduk;
 - d. Pencapaian target nasional penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebesar 30% dari Jumlah Penduduk yang memiliki KTL el; dan
 - e. Berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk, digital dalam genggaman.
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan Dukcapil **Prima**
- a. Dengan budaya kerja dan semangat “Dukcapil **PRIMA**” memaknai mendalam dan membawa makna amat penting untuk mewujudkan pelayanan berkualitas lebih baik;
 - **P** berarti **Profesional**, Prinsip profesionalisme adalah fondasi utama dari Dukcapil Prima.
 - **R** berarti **Responsif**, Responsivitas adalah kunci untuk merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.
 - **I** berarti **Inovatif**, Kemajuan teknologi adalah elemen utama dalam inovasi Dukcapil Prima.
 - **M** berarti **Melayani**, nilai inti dari Dukcapil Prima adalah pelayanan dari hati.
 - **A** berarti **Akuntabel**, Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam Dukcapil Prima.
 - b. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara lain: melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor Induk Kependudukan, mewujudkan pelayanan yang cepat/tidak membiarkan penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat
 - c. Merealisasikan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan

- kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian;
- d. Evaluasi terhadap layanan Dukcapil dalam penambahan indikator terkait penerapan buku pokok pemakaman/pelaporan kematian dari desa/kelurahan dengan target minimal 10 per kabupaten/kota;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
- a. Sinkronisasi data Kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Melaksanakan koordinasi, evaluasi terkait Data Kependudukan.

Tabel T-II.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi kependudukan	a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Akses Pelayanan Belum Merata	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kebermanfaatan Dokumen Administrasi Kependudukan - Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten di Bidang Administrasi Kependudukan - Belum Selarasnya Regulasi Administrasi Kependudukan dengan Kebijakan K/L Lainnya - Tantangan Kondisi Geografis
2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	a. Data Kependudukan dari Disdukcapil, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk semua keperluan proses pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah - Rendahnya Pelaporan Pemanfaatan Data dan Data Balikan oleh Perangkat Daerah - Sulitnya proses pemadanan/penyandingan data kependudukan dikarenakan diterapkannya kebijakan SIAK Terpusat yang berdampak Disdukcapil Provinsi tidak dapat memberikan/menyajikan data kependudukan kepada instansi/lembaga - lain k Terbatasnya Sarana dan Prasarana Untuk Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota karena sudah tidak memiliki data By

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. *Review* terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel T-II.3 *Reviu* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana	
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	Nilai		19.331.183.113	A (81,00)	Nilai		15.188.430.621	APBD	
			Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65)	Nilai			B (66,65)	Nilai				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai dengan ketentuan	10	Dokumen	Jawa Barat	245,000,000	10	Dokumen	Jawa Barat	135,000,000	APBD	
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	Jawa Barat	60,000,000	7	Dokumen	Jawa Barat	50,000,000	APBD	
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	Jawa Barat	85,000,000	3	Dokumen	Jawa Barat	65,000,000	APBD	
1.3		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			1	Data	Kota Bandung	50,000,000	1	Data	Kota Bandung	10,000,000	APBD
1.4		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1	Dokumen	Kota Bandung	50,000,000	1	Dokumen	Kota Bandung	10,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	3	Laporan	Kota Bandung	11,040,000,000	3	Laporan	Kota Bandung	10,779,443,630	APBD
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	Kota Bandung	11,000,000,000	60	Orang/Bulan	Kota Bandung	10,809,443,630	APBD
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17	Laporan	Kota Bandung	40,000,000	17	Laporan	Kota Bandung	30,000,000	APBD
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	20	Orang	Jawa Barat	40,000,000	20	Orang	Jawa Barat	30,000,000	APBD
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	Jawa Barat	40,000,000	20	Orang	Jawa Barat	30,000,000	APBD
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	1	Laporan	Kota Bandung	1,875,000,000	1	Laporan	Kota Bandung	1,465,000,000	APBD
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	Kota Bandung	100,000,000	3	Paket	Kota Bandung	75,000,000	APBD
4.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	Kota Bandung	135,000,000	8	Paket	Kota Bandung	50,000,000	APBD
4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Kota Bandung	40,000,000	2	Paket	Kota Bandung	40,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	Kota Bandung	150,000,000	7	Paket	Kota Bandung	150,000,000	APBD
4.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Jawa Barat	1,450,000,000	12	Laporan	Jawa Barat	1,150,000,000	APBD
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	12	Laporan	Kota Bandung	1,590,183,113	12	Laporan	Kota Bandung	1,475,000,000	APBD
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bandung	140,183,113	12	Laporan	Kota Bandung	125,000,000	APBD
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bandung	1,450,000,000	12	Laporan	Kota Bandung	1,350,000,000	APBD
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	90	Unit	Kota Bandung	1,700,000,000	90	Unit	Kota Bandung	500,000,000	APBD
6.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Paket	Kota Bandung	250,000,000	9	Paket	Kota Bandung	100,000,000	APBD
6.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	Unit	Kota Bandung	1,450,000,000	90	Unit	Kota Bandung	400,000,000	APBD
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	27	Unit	Kota Bandung	2,841,000,000	27	Unit	Kota Bandung	773,986,991	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

7.1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	Kota Bandung	150,000,000	4	Unit	Kota Bandung	110,000,000	APBD
7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	Kota Bandung	115,000,000	23	Unit	Kota Bandung	115,000,000	APBD
7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	Kota Bandung	70,000,000	75	Unit	Kota Bandung	48,986,991	APBD
7.4		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Kota Bandung	2,456,000,000	1	Unit	Kota Bandung	500,000,000	APBD
7.5		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Kota Bandung	50,000,000	1	Unit	Kota Bandung	0	APBD
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98,89	Persen	Jawa Barat	600,000,000	98,89	Persen	Jawa Barat	600,000,000	APBD	

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	450,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	450,000,000	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4	Dokumen	Jawa Barat	325,000,000	4	Dokumen	Jawa Barat	250,000,000	APBD
1.2		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1	Dokumen	Jawa Barat	125,000,000	1	Dokumen	Jawa Barat	0	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	150,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	100,000,000	APBD
2.1		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5	Laporan	Jawa Barat	150,000,000	5	Kab/Kota	Jawa Barat	100,000,000	APBD
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99.05	Persen	Jawa Barat	460,000,000	99.05	Persen	Jawa Barat	460,000,000	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	12	Dokumen	Jawa Barat	310,000,000	12	Dokumen	Jawa Barat	350,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	12	Dokumen	Jawa Barat	310,000,000	12	Kab/Kota	Jawa Barat	0	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	150,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350,000,000	APBD
2.1		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kotata	5	Laporan	Jawa Barat	150,000,000	5	Laporan	Jawa Barat	350,000,000	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Data yang dimanfaatkan	83.78	Persen	Jawa Barat	950,000,000	83.78	Persen	Jawa Barat	600,000,000	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	31	Dokumen	Jawa Barat	500,000,000	32	Dokumen	Jawa Barat	280,000,000	APBD
1.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4	Laporan	Jawa Barat	300,000,000	4	Laporan	Jawa Barat	140,000,000	APBD
1.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1	Dokumen	Jawa Barat	200,000,000	1	Dokumen	Jawa Barat	140,000,000	APBD
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Laporan Kab/Kota yang terbina dan terawasi sesuai ketentuan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	450,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	320,000,000	APBD
2.1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	12	Laporan	Jawa Barat	250,000,000	12	Laporan	Jawa Barat	220,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

		Administrasi Kependudukan										
2.2		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	54	Orang	Jawa Barat	200,000,000	54	Orang	Jawa Barat	100,000,000	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	100	Persen	Jawa Barat	120,000,000	100	Persen	Jawa Barat	100,000,000	APBD
1			Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3	Dokumen	Jawa Barat	120,000,000	3	Dokumen	Jawa Barat	100,000,000	APBD
1.1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	3	Dokumen	Jawa Barat	120,000,000	3	Dokumen	Jawa Barat	100,000,000	APBD
Jumlah							21,461,183,113	Jumlah			16,588,430,621	APBD

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah melakukan sesuai dengan mekanisme Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana mekanisme yang dilakukan dalam usulan program kegiatan dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah, dimana Forum Perangkat Daerah sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrembang kab/kota dengan Perangkat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Mekanisme yang dilaksanakan pada Forum Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan tim penyelenggara oleh Kepala Perangkat Daerah yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan
 - b. Tim penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - Mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi yang berasal dari delegasi kabupaten/kota yang terkait dengan fungsi Perangkat Daerah skala Provinsi;
 - Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk Forum Perangkat Daerah;
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pemaparan Materi;
 - Forum Perangkat Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (DR. Teguh Setyabudi, M.Pd.);
 - Sinergitas Program Kegiatan Pusat dan Daerah disampaikan oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Andi Kriarmoni, SE, .S.IP, .MM.);

- Transformasi Digital Pelayanan Publik disampaikan oleh Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama (Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.SE.M.Eng);
 - Penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si);
 - Transformasi Digital Kota Bekasi disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Dr. Taufiq R Hidayat, AP, M.Si.);
 - Sinkronisasi Data Berkelanjutan disampaikan oleh JFT. Pranata Komputer Ahli Muda (Asep T. Firdaus, S.STP., M.Si); dan
 - Kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan disampaikan oleh Ketua Tim Pokja Perkembangan Sistem dan Aplikasi (H. Paturi Abdul Wahid, S.E.).
- b. Perumusan hasil kesepakatan setelah dilaksanakannya diskusi tanya jawab antara narasumber dengan peserta Forum Perangkat Daerah.
3. Tahap Pasca Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi
- a. Menyusun Berita Acara;
 - b. Menyusun pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi.

Diharapkan dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah diperoleh output yang diinginkan guna mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat.

Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan tema **“Transformasi Digital dan Penataan Sumber Daya Manusia Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat”** telah dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Senin s.d. Selasa, 19 s.d. 20 Februari 2024
Jam : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : HARIS Hotel & Convention Festival Citylink
Jl. Peta No. 241 Kota Bandung



Gambar 2.1 Forum Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pada Forum Perangkat Daerah menjadi informasi awal penjangkaran usulan-usulan Kabupaten/Kota untuk perencanaan bantuan keuangan regular tahun 2025. Selanjutnya usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan kemudian diteruskan kepada PD/Biro terkait untuk diusulkan melalui Forum PD dan Musrenbang Provinsi. Kamus usulan Bantuan Keuangan regular Tahun 2025 urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-II.4 Kamus Bantuan Keuangan Regular Tahun 2025

No	Uraian / Judul	Deskripsi	Isu	Bidang	Program	Kegiatan
1	Pembaharuan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pelayanan Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitas Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan	Sekretariat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rekap usulan-usulan bantuan keuangan regular kabupaten/kota yang sesuai dengan tema dan kamus selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat. Rekap usulan bantuan keuangan regular dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel T-II.5 Rekap usulan Bantuan Keuangan Reguler Kabupaten/Kota Melalui Forum Perangkat Daerah

KODE WILAYAH	NAMA PENERIMA	URAIAN				JUMLAH	KETERANGAN
		Mobil Pelayanan Keliling	Motor Pelayanan Keliling	Sarpras Alat Rekam	Lain-lain		
3201	Kabupaten Bogor	2.700.000.000	3.000.000.000	6.850.000.000		12.550.000.000	
3202	Kabupaten Sukabumi	400.000.000		4.599.000.000		4.999.000.000	
3203	Kabupaten Cianjur			11.464.760.500		11.464.760.500	
3204	Kabupaten Bandung			3.671.185.000		3.671.185.000	
3205	Kabupaten Garut					-	Tidak mengajukan
3206	Kabupaten Tasikmalaya	1.431.000.000		6.090.000.000		7.521.000.000	
3207	Kabupaten Ciamis	1.150.000.000	600.000.000	7.310.500.000		9.060.500.000	
3208	Kabupaten Kuningan			9.273.316.000		9.273.316.000	
3209	Kabupaten Cirebon			2.253.406.500		2.253.406.500	
3210	Kabupaten Majalengka	1.200.000.000		1.747.600.000		2.947.600.000	
3211	Kabupaten Sumedang	1.500.000.000		4.105.600.000		5.605.600.000	
3212	Kabupaten Indramayu			5.132.974.000		5.132.974.000	
3213	Kabupaten Subang			5.636.000.000		5.636.000.000	
3214	Kabupaten Purwakarta		100.000.000	851.000.000		951.000.000	
3215	Kabupaten Karawang			966.874.750		966.874.750	
3216	Kabupaten Bekasi	7.000.000.000	1.250.000.000	3.607.000.000		11.857.000.000	
3217	Kabupaten Bandung Barat	2.000.000.000		3.427.841.000	736.828.073	6.164.669.073	
3218	Kabupaten Pangandaran	990.800.000				990.800.000	
3271	Kota Bogor	900.000.000		5.248.095.000		6.148.095.000	
3272	Kota Sukabumi	1.000.000.000		835.000.000		1.835.000.000	
3273	Kota Bandung			6.915.550.000		6.915.550.000	
3274	Kota Cirebon	1.115.000.000	180.000.000	629.000.000		1.924.000.000	
3275	Kota Bekasi	3.180.000.000			20.000.000	3.200.000.000	
3276	Kota Depok			5.779.555.000		5.779.555.000	
3277	Kota Cimahi			1.434.200.000		1.434.200.000	
3278	Kota Tasikmalaya			2.518.500.000	1.357.500.000	3.876.000.000	
3279	Kota Banjar		49.000.000	1.134.375.000		1.183.375.000	
JUMLAH		24.566.800.000	5.179.000.000	101.481.332.750	2.114.328.073	133.341.460.823	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan

Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Dalam hal ini Prioritas 6 menjadi tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 2024 - 2026. Sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;

3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2025 sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program

(outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T-III. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja dan Pendanaan 2025				Rencana Kerja dan Pendanaan 2026				Sumber Dana	
				Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Satuan	Lokasi	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	Nilai		15,188,430,621	A (81,50)	Nilai		18,829,396,667	APBD	
			Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,65)	Nilai			B (66,80)	Nilai				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai dengan ketentuan	10	Dokumen	Jawa Barat	135,000,000	10	Dokumen	Jawa Barat	255,000,000	APBD	
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	Jawa Barat	50,000,000	7	Dokumen	Jawa Barat	65,000,000	APBD	
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	Jawa Barat	65,000,000	3	Dokumen	Jawa Barat	90,000,000	APBD	
1.3		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			1	Data	Kota Bandung	10,000,000	1	Data	Kota Bandung	50,000,000	APBD
1.4		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik			1	Dokumen	Kota Bandung	10,000,000	1	Dokumen	Kota Bandung	50,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

		Sektoral Daerah										
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	3	Laporan	Kota Bandung	10,809,443,630	3	Laporan	Kota Bandung	11,242,500,000	APBD
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	Kota Bandung	10,779,443,630	60	Orang/Bulan	Kota Bandung	11,200,000,000	APBD
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17	Laporan	Kota Bandung	30,000,000	17	Laporan	Kota Bandung	42,500,000	APBD
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	20	Orang	Jawa Barat	30,000,000	20	Orang	Jawa Barat	50,000,000	APBD
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	Jawa Barat	30,000,000	20	Orang	Jawa Barat	50,000,000	APBD
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	1	Laporan	Kota Bandung	1,875,000,000	1	Laporan	Kota Bandung	1,890,000,000	APBD
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	Kota Bandung	75,000,000	3	Paket	Kota Bandung	100,000,000	APBD
4.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	Kota Bandung	50,000,000	8	Paket	Kota Bandung	137,500,000	APBD
4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Kota Bandung	40,000,000	2	Paket	Kota Bandung	42,500,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	Kota Bandung	150,000,000	7	Paket	Kota Bandung	155,000,000	APBD
4.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Jawa Barat	1,150,000,000	12	Laporan	Jawa Barat	1,455,000,000	APBD
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	12	Laporan	Kota Bandung	1,475,000,000	12	Laporan	Kota Bandung	1,650,000,000	APBD
5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bandung	125,000,000	12	Laporan	Kota Bandung	150,000,000	APBD
5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Kota Bandung	1,350,000,000	12	Laporan	Kota Bandung	1,500,000,000	APBD
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	90	Unit	Kota Bandung	500,000,000	90	Unit	Kota Bandung	1,346,896,667	APBD
6.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Paket	Kota Bandung	100,000,000	9	Paket	Kota Bandung	260,000,000	APBD
6.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	Unit	Kota Bandung	400,000,000	90	Unit	Kota Bandung	1,086,896,667	APBD
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	27	Unit	Kota Bandung	2,841,000,000	27	Unit	Kota Bandung	2,687,500,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	Unit	Kota Bandung	110,000,000	4	Unit	Kota Bandung	120,000,000	APBD
7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	Kota Bandung	115,000,000	23	Unit	Kota Bandung	120,000,000	APBD
7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	Kota Bandung	48,986,991	75	Unit	Kota Bandung	75,000,000	APBD
7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Kota Bandung	500,000,000	1	Unit	Kota Bandung	2,000,000,000	APBD
7.5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Kota Bandung	0	1	Unit	Kota Bandung	50,000,000	APBD
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	98,89	Persen	Jawa Barat	350,000,000	98,89	Persen	Jawa Barat	475,000,000	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran penduduk	27	Kab/Kota	Jawa Barat	250,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4	Dokumen	Jawa Barat	250,000,000	4	Dokumen	Jawa Barat	350,000,000	APBD
1.2		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1	Dokumen	Jawa Barat	0	1	Dokumen	Jawa Barat	0	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	100,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	125,000,000	APBD
2.1		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5	Laporan	Jawa Barat	100,000,000	5	Kab/Kota	Jawa Barat	125,000,000	APBD
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99.05	Persen	Jawa Barat	460,000,000	99.05	Persen	Jawa Barat	485,000,000	APBD
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil	12	Dokumen	Jawa Barat	350,000,000	12	Dokumen	Jawa Barat	380,000,000	APBD
1.1		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	12	Dokumen	Jawa Barat	0	12	Kab/Kota	Jawa Barat	0	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	350,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	380,000,000	APBD
2.1		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	5	Laporan	Jawa Barat	350,000,000	5	Laporan	Jawa Barat	380,000,000	APBD
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Data yang dimanfaatkan	83.78	Persen	Jawa Barat	950,000,000	83.78	Persen	Jawa Barat	1,020,000,000	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	31	Dokumen	Jawa Barat	280,000,000	32	Dokumen	Jawa Barat	400,000,000	APBD
1.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4	Laporan	Jawa Barat	140,000,000	4	Laporan	Jawa Barat	200,000,000	APBD
1.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1	Dokumen	Jawa Barat	140,000,000	1	Dokumen	Jawa Barat	200,000,000	APBD
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah Laporan Kab/Kota yang terbina dan terawasi sesuai ketentuan	27	Kab/Kota	Jawa Barat	320,000,000	27	Kab/Kota	Jawa Barat	410,000,000	APBD
2.1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	12	Laporan	Jawa Barat	220,000,000	12	Laporan	Jawa Barat	260,000,000	APBD

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

2.2		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	54	Orang	Jawa Barat	100,000,000	54	Orang	Jawa Barat	150,000,000	APBD
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	100	Persen	Jawa Barat	100,000,000	100	Persen	Jawa Barat	150,000,000	APBD
1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3	Dokumen	Jawa Barat	100,000,000	3	Dokumen	Jawa Barat	150,000,000	APBD
1.1		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	3	Dokumen	Jawa Barat	100,000,000	3	Dokumen	Jawa Barat	150,000,000	APBD
Jumlah							16,588,430,621	Jumlah			20,644,396,667	APBD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas berbagai aspek yang berkaitan dengan penduduk, seperti pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, dan administrasi kependudukan. Untuk menjalankan tugas-tugas ini dengan efisien dan efektif, dinas ini perlu memiliki rencana kerja yang terstruktur dan terukur.

Rencana kerja dalam dinas ini akan mencakup langkah-langkah untuk memastikan data penduduk tercatat dengan baik dan akurat, proses perizinan pernikahan yang efisien, serta upaya-upaya dalam mengatasi berbagai perubahan status kependudukan seperti perpindahan dan kewarganegaraan. Dalam rencana kerja ini, akan dijelaskan bagaimana petugas dinas akan bekerja, bagaimana prosesnya, serta standar yang harus diikuti.

Pendanaan dalam dinas ini juga sangat vital. Pendanaan akan digunakan untuk menyediakan sumber daya seperti infrastruktur teknologi informasi, pelatihan petugas, serta perangkat untuk pencatatan data yang lebih baik. Sumber pendanaan bisa berasal dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana pendanaan harus memastikan bahwa anggaran tersedia untuk menjalankan operasional dinas ini dengan baik.

Tujuan dari rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, menjaga data kependudukan yang akurat, dan memastikan keterbukaan dan aksesibilitas informasi kependudukan. Dengan rencana yang baik dan pendanaan yang memadai, dinas ini dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Rencana Kerja dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan dengan Lokasi tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Total Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp. 16.588.430.621,- (Enam juta lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-IV. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000
				1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,000,000
				1.1.3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10,000,000
				1.1.4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10,000,000
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,779,443,630
				1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	30,000,000
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000
		1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,000,000
				1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000
				1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000
				1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000

				1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,150,000,000
		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,000,000
				1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,350,000,000
		1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Pengadaan Mebel	100,000,000
				1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110,000,000
				1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,000,000
				1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,986,991
				1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500,000,000
				1.7.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan	0
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	250,000,000
				2.1.2	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	0

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

		2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2.2.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	100,000,000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	3.1.1	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	0
				3.1.2	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota	350,000,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	4.1.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140,000,000
				4.1.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	140,000,000
		4.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	220,000,000
				4.2.2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	100,000,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.1	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	5.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	100,000,000
Jumlah Kebutuhan Dana						16,588,430,621

Jumlah Belanja Operasi untuk Tahun 2025 berdasarkan pagu indikatif **Rp. 16.588.430.621,-** (Enam juta lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2025 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2025.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja tahun 2025 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja tahun 2025 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 9 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003